

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dalam segi perekonomian, oleh karena itu untuk mewujudkan negara yang makmur dan sejahtera diperlukan pembangunan yang merata. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS dijelaskan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia selama 5 tahun terakhir adalah 5,78% (sumber: Badan Pusat Statistik 2013). Pembangunan Nasional yang diupayakan terus-menerus mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera dalam segala aspek kehidupannya.

Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan sumber daya dan pembiayaan yang tidak sedikit. Oleh karena itu pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Maka dari itu pemerintah sangat berusaha keras untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak.

Pentingnya pajak dalam pembangunan negara terjadi karena beberapa hal. Pertama, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Tahun 2013 penghasilan dari sektor pajak mencapai Rp. 1.193 triliun atau sekitar 75% dari penerimaan APBN (Sumber : Badan Pusat Statistik 2013). Kedua, pajak merupakan sumber yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Setiap tahun anggaran pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan. Semakin besar penerimaan negara dari

pajak, maka semakin besar pula kemampuan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan. Dan yang ketiga, pajak dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat bahkan sudah dijamin dalam Undang-Undang jika penerimaannya ditingkatkan lebih lagi.

Selain peran pajak yang penting terhadap pembangunan negara, pemerintah juga menuntut perhatian dan upaya serius untuk memastikan bahwa pemungutan pajak telah dilakukan dengan optimal dan proses pendistribusian penerimaan pajak dalam program-program pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Tabel.1.1 Perbandingan Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan APBN

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pendapatan Negara	499.224	637.987	707.806	981.609	848.763	992.392	1.086.069	1.334.476
Penerimaan Pajak	347.031	409.203	490.988	658.700	619.922	743.325	873.735	1.011.735
Presentase	70,08%	64,14%	69,37%	67,10%	73,04%	74,90%	80,45%	75,25%

Sumber: Kementerian Keuangan, Tahun 2012.

Dalam Tabel 1.1 menggambarkan perbandingan antara penerimaan pajak dengan pendapatan negara. Setiap tahunnya penerimaan pajak belum maksimal, sehingga penerimaan negara melalui pajak tidak optimal. Ada beberapa upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya adalah reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan dilakukan karena pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi Negara serta masyarakatnya. Oleh karena itu, reformasi perpajakan perlu secara konsisten dilakukan terus menerus.

Modernisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah tentunya memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak tinggi. Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan, pelayanan prima disetiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menjadi salah satu yang utama untuk dilaksanakan, yang diimbangi dengan pengawasan yang efektif.

Ada beberapa faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Rapina (2 Oktober 2011) menemukan bahwa kepatuhan akan pajak ditentukan oleh struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi. Sementara itu Allingham dan Sandmo (1972) menyebutkan bahwa kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak atau membayar pajak tapi pajak yang dibayar tidak sesuai dari penghasilan yang sebenarnya disebabkan rendahnya pengawasan pemerintah dan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh masih sangat kecil.

Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran cenderung rendah (Surya: 2013). Dalam APBN Perubahan 2013, penerimaan pajak ditargetkan Rp. 995,2 triliun atau 66 persen lebih dari target penerimaan negara tahun 2013 sebanyak 1.502 triliun. Dirjen Pajak mendata, Wajib Pajak Orang Pribadi, baru sekitar 25 juta saja yang telah membayar pajak dari sekitar 60 juta masyarakat yang seharusnya membayar (sumber : www.pikiran-rakyat.com). Hal ini berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara yang tentunya semakin rendah, dan akan berdampak pula terhadap pembangunan nasional yang akan terhambat.

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Franzoni (1999) menyebutkan kepatuhan atas pajak (tax compliance) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu.

Allingham dan Sandmo (1972) menyebutkan kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak atau membayar pajak tapi pajak yang dibayar tidak sesuai dari penghasilan yang sebenarnya disebabkan rendahnya pengawasan pemerintah dan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh masih sangat kecil. Jika kita lihat pada jaman kerajaan dahulu, seluruh warga patuh membayar pajaknya atau dikenal dengan istilah upeti raja karena takut hukuman berat yang akan diterima apabila tidak membayar pajak.

Oleh karena itu, penelitian mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dan evaluasi mengenai reformasi perpajakan masih penting untuk terus dilakukan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh modernisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang selanjutnya akan dituangkan sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Bojonagara)”

Berikut adalah tabel penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penulis :

Tabel 1.2 Penelitian-Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Hasil/Kesimpulan
1.	Lasnofa Fasmi – Fauzan Misra	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang	Sistem Administrasi Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.
2.	Sri Rahayu – Ita Salsalina Lingga (2 November 2009)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3.	Sinta Setiana, dkk (2 November 2010)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara)	Sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak.
4.	Rapina, dkk. (2 Oktober 2011)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)	Sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas penerapan sistem administrasi modern pada KPP Pratama Bojonagara?
2. Apakah terdapat pengaruh antara penerapan modernisasi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak?
3. Seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisa mengenai Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bojonagara.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan sistem administrasi modern pada KPP Pratama Bojonagara.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara penerapan modernisasi administrasi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap Wajib Pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Bagi penulis sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian kesarjanaaan untuk meraih gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Kristen Maranatha, selain itu semoga hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis khususnya mengenai Modernisasi Administrasi Perpajakan.

2. Bagi Universitas dan Mahasiswa

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberi kegunaan dokumentasi guna melengkapi saran yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak yang membutuhkan dan menjadi refrensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bagi KPP Pratama Bojonagara.

Sebagai bahan masukan, pertimbangan dan pengevaluasian dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada wilayah kerja KPP Pratama Bojonagara.